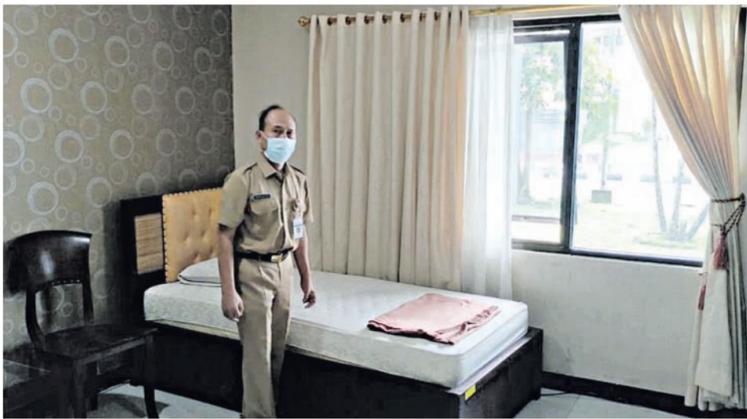




## Pranatan Anyar



KR-Abdul Alim

Kamar isolasi mandiri di Asrama Haji Donohudan.

### ASRAMA HAJI DONOHUDAN Jadi Rujukan OTG Covid-19

KARANGANYAR (KR) - Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) Karanganyar mulai mengirim pasien Covid-19 yang termasuk orang tanpa gejala (OTG) ke Asrama Haji Donohudan, Boyolali. Penggunaan fasilitas milik Pemrov Jawa Tengah itu menjadi rujukan pertama tempat isolasi mandiri sebelum disiapkannya Gedung Balai Latihan Kerja (BLK) Karanganyar.

Plt Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) Karanganyar Purwati mengatakan, satu orang pasien asal Tawangmangu telah mengisi ruang isolasi di Asrama Haji. Ia menyatakan kesanggupan tinggal sementara di sana sampai dinyatakan sembuh. "Masuknya Sabtu (12/12). Baru satu itu. Sebenarnya ada dua pasien lagi yang akan dikirim ke sana, dari Colomadu dan Jaten. Tapi pasien menolak. Mereka lebih memilih isolasi mandiri di

rumahnya," kata Purwati, Selasa (15/12).

Penggunaan fasilitas milik Pemerintah dianjurkan untuk mengisolasi mandiri pasien Covid-19 tanpa gejala. Selain pemantauan lebih ketat, juga dijamin suplai obat-obatan. Cara ini juga untuk menekan kluster keluarga. Kabupaten Karanganyar hingga saat ini belum membuka fasilitas isolasi mandiri di BLK Karanganyar. Mengenai hal ini, Purwati mengaku sedang menyiapkan sarana penunjang isolasi mandiri di sana.

Sementara itu Kepala Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Karanganyar Siti Maesyaroeh yang terparap Covid-19 masih dirawat di RSUD Karanganyar. "Tidak banyak yang ditracing dari Bu Siti Maesyaroeh. Kondisinya baik. Kantornya juga sudah mulai aktif berkegiatan setelah beberapa hari tutup," katanya. (Lim)-d

### SOAL JATAH DAN ANGGARAN VAKSINASI DIY Masih Tunggu Kepastian Pusat

YOGYA (KR) - Pemda DIY sampai saat belum mendapatkan kepastian terkait jumlah atau dosis vaksin yang akan diterima dari Pemerintah Pusat. Untuk itu koordinasi dengan Kementerian Kesehatan terus dilakukan guna mendapatkan kejelasan soal tersebut. Termasuk soal adanya informasi yang menyatakan sebagian biaya vaksinasi Covid-19 rencananya dibebankan ke daerah, Pemda DIY juga masih menunggu kejelasan dari pusat.

"Memang ada info sementara soal vaksin ada biaya yang akan dibebankan ke daerah. Padahal APBD DIY sudah ditetapkan. Sampai hari ini Pemda DIY belum mendapatkan informasi akan mendapatkan vaksin berapa. Begitu pula soal komponen apa saja yang akan dibiayai lewat APBD belum tahu. Untuk itu kami telah minta untuk dilakukan pengecekan ke Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Kesehatan untuk dijadikan bahan rapat dengan DPRD DIY," kata Sekda DIY Drs K Baskara Aji MM di Kepatihan, Yogyakarta, Selasa (15/12).

Baskara Aji mengungkapkan, meski pihaknya belum mendapat informasi jumlah vaksin yang bakal diterima DIY, namun diharapkan sesuai kebutuhan dan permintaan

daerah. Untuk itu pihaknya berharap segera ada kejelasan dari pusat, sehingga Pemda DIY bisa segera mempersiapkan diri.

DPRD DIY dalam waktu dekat akan membahas perihal Program Vaksinasi Covid-19, khususnya mengenai pendanaan, mengingat sampai saat ini di DPRD DIY memang belum ada anggaran khusus untuk vaksin. "Pekan ini, DPRD DIY akan membahas tentang vaksin Covid-19. Ini sebagai bentuk keseriusan kami dalam mendukung upaya Pemerintah untuk memutus rantai Covid-19," kata Wakil Ketua DPRD DIY Huda Tri Yudianta.

Berapa anggaran yang akan disiapkan, Huda belum bisa menyebutkan angkanya pasti. Namun kemungkinan besar akan diambilkan dari anggaran Belanja Tak Terduga (BTT) yang sebelumnya sudah dialokasikan Rp 66 miliar. Jika ternyata kurang, DPRD DIY akan berupaya ada penambahan alokasi.

Sedangkan Juru Bicara Pemda DIY untuk Penanganan Covid-19 Bertu Murtiningsih mengatakan, kasus positif Covid-19 di DIY bertambah 160 kasus menjadi 8.418 kasus. Untuk pasien sembuh bertambah 107 menjadi 5.775 dan kasus meninggal bertambah tiga orang menjadi 172 kasus. (Ria/Awh/Ira)-d

### Jateng Targetkan 21,2 Juta Warga Divaksin

SEMARANG (KR) - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan, Jawa Tengah menargetkan 21,2 juta warganya bakal mendapatkan vaksinasi Covid-19. Dari jumlah itu, tenaga kesehatan menjadi prioritas saat proses vaksinasi berlangsung.

Ganjar Pranowo mengatakan hal itu di Semarang, Senin (14/12), usai memimpin Rapat Penanggulangan Covid-19 di Kantor Gubernur Jateng. Untuk tahap pertama, Jateng akan mendapatkan vaksin sebanyak 421.000 dosis, sementara sisanya masih menunggu keputusan dari Pemerintah Pusat.

Ganjar mengakui tahap pertama Jateng hanya mendapatkan vaksin dalam jumlah sedikit. Sementara kebutuhan vaksin untuk Jateng diperkirakan sebanyak 21.252.747 dosis. Pemrov Jateng sudah melakukan kalkulasi termasuk urutan-urutan siapa sasaran penerima vaksinnya.

Dari target 21,2 juta calon penerima vaksin

di Jateng, Ganjar merinci prioritas pertama tenaga kesehatan sipil sebanyak 22.947 orang, kemudian tenaga kesehatan dari TNI 1.358 orang dan tenaga medis Polri 965 orang. Setelah itu baru untuk anggota BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) 11,7 juta, Satpol PP 4.788, TNI yang bertugas dalam pelayanan publik 27.295 dan Polri yang bertugas di lapangan 33.741.

Selain itu, ada pula kategori lainnya dengan target 1,8 juta orang dan masyarakat serta pelaku ekonomi sebanyak 7,5 juta orang. Nantinya Pemrov Jateng akan membuat sistem aplikasi antrean agar semua bisa terlayani dengan baik. "Itu urutan-urutannya yang akan dilakukan di Jateng. Kalau saya ditanya Gubernur urutan yang mana, Gubernur masuk dalam kategori lainnya. Jadi nggak tahu dapatnya kapan. Tapi kalau masyarakat ragu dan saya harus disuntik duluan, ya tidak apa-apa. Saya siap saja," ujar Ganjar. (Bdi)-d

### TEKAN LAJU COVID-19

### Polisi, TNI, Pol PP Lakukan Patroli

MAGELANG (KR) - Untuk menekan laju penyebaran Covid-19, Polres Kabupaten Magelang bersama TNI dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), terus menggiatkan operasi yustisi di sejumlah tempat. Mereka juga aktif melakukan patroli bersama mulai pukul 21.00 ke atas, melibatkan Babinsa dan Bhabinkamtibmas serta Satgas Penanganan Covid-19 Kecamatan dan Desa.

"Kami terus meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melakukan gerakan 3M (memakai masker, menjauhi kerumunan dan mencuci tangan pakai sabun). Juga membuat 211 konten produktif kreatif multimedia sebanyak 211, terdiri meme 210, video satu kali,

viralisasi medsos 1.239 di Twitter, Facebook dan Instagram. Semua itu sebagai tindakan preventif, untuk menekan penyebaran Covid-19," kata Kasubag Humas Polres Magelang Iptu Abdul Mutohir, Selasa (15/12).

Dalam operasi yustisi bersama TNI dan Satpol PP itu, kata Tohirin, hasilnya ada 16.333 teguran dan sanksi sosial sebanyak 21.646 kali.

"Sedangkan bentuk pelanggaran, tidak pakai masker 31.506, kerumunan 933, *physical distancing* 4.433 dan pelanggaran lainnya 1.095. Untuk jumlah sasaran, ada 37.967 orang di 2.942 tempat dan di 2.830 kegiatan," sebutnya. (Bag)-d

### SEBELUM ADA KEPUTUSAN RESMI PEMERINTAH

## RS Dilarang Promosi Vaksinasi Covid-19

JAKARTA (KR) - Agar tidak terjadi kesimpangsiuran di tengah masyarakat, rumah sakit diminta tidak melakukan promosi tentang Program Vaksinasi Covid-19 sebelum ada keputusan resmi dari Pemerintah.

"Jangan melakukan promosi atau kegiatan serupa terkait program vaksinasi sebelum ada keputusan resmi Pemerintah, untuk mencegah kesimpangsiuran di tengah masyarakat," ujar Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito dalam konferensi pers secara daring di Jakarta, Selasa (15/12).

Hal senada disampaikan Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dr Siti Nadia Tarmizi yang mengatakan, Pemerintah masih menunggu *Emergency Use Authorization* (EUA) atau Izin Sementara dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait penggunaan vaksin Covid-19 dari Sinovac,

China. "Masih menunggu persetujuan EUA dari BPOM dan sertifikasi kehalalan dari MUI," katanya.

Sebanyak 1,2 juta dosis vaksin Sinovac asal China telah tiba di Tanah Air pada Minggu (6/12) lalu, yang diangkut menggunakan Pesawat Garuda Indonesia. Izin EUA dibutuhkan untuk mengetahui keamanan penggunaan serta kehalalan dari vaksin produksi China tersebut.

Menurutnya, izin EUA dari BPOM sebenarnya bisa berjalan secara paralel dengan sertifikasi halal yang akan dikeluarkan oleh MUI. "Jadi ini sedang dikerjakan oleh BPOM dan MUI," ujar Siti Nadia.

Apabila izin EUA dan sertifikasi halal dari BPOM dan MUI sudah keluar, maka vaksinasi pada masyarakat segera di-

lakukan. Untuk memperlancar proses vaksinasi, Pemerintah telah menyiapkan 29.000 vaksinator (pemberi vaksinasi) yang tersebar di sejumlah layanan kesehatan.

Dijelaskan, vaksinator tersebut akan disebarkan di 10.400 Puskesmas, 2.000 rumah sakit dan 49 Kantor Kesehatan Pelabuhan di berbagai wilayah Tanah Air. Secara umum terdapat beberapa alasan pemilihan vaksin Sinovac yang akan disuntikkan pada masyarakat. Pertama, aman, bermutu dan memiliki efikasi tinggi. Sebelum memutuskan vaksin yang akan dipakai, Pemerintah juga melakukan kajian dan masukan dari para ahli terutama Penasihat Immunisasi Nasional atau Indonesia Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI). "Ini yang kemudian mengkaji berdasarkan literatur dan informasi-informasi yang tentunya saintifik dan Sinovac masuk dalam kriteria tersebut," katanya. (Ati)-d

### TIM MITIGASI IDI IMBAU HINDARI KERUMUNAN

## Penderita Covid-19 dan Kematian Nakes Meningkat

YOGYA (KR) - Tim Mitigasi Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) minta kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah termasuk para pemimpin daerah yang baru saja terpilih dalam Pilkada, untuk memprioritaskan penanganan pandemi Covid-19. Aktivitas masyarakat yang berkerumun tidak hanya berdampak pada melonjaknya penderita Covid-19, namun juga kematian tenaga medis dan kesehatan.

"Karena itu, dalam kehidupan adaptasi baru ini, masyarakat diimbau tetap menjalankan protokol kesehatan dan menghindari aktivitas yang melibatkan kerumunan. Meski vaksin Covid-19 sudah tersedia, namun untuk perlindungan maksimal harus tetap juga menjalankan protokol kesehatan. Sedangkan kepada para tenaga medis dan kesehatan agar tetap waspada dan tetap menggunakan alat pelindung diri (APD) dalam menjalankan tugasnya,"

papar Tim Mitigasi PB IDI Dr Adib Khumaidi SpOT dalam keterangan persnya, Selasa (15/12).

Adib menyampaikan, dari Maret hingga pertengahan Desember 2020 ini, terdapat total 363 petugas medis dan kesehatan yang meninggal dunia akibat terinfeksi Covid-19. Nakes tersebut terdiri 202 dokter, 15 dokter gigi, dan 146 perawat.

Para dokter yang meninggal tersebut terdiri 107 dokter umum (empat guru besar), 92 dokter spesialis (tujuh guru besar), dua residen, dan satu dalam verifikasi yang keseluruhannya berasal dari 24 IDI Wilayah (Provinsi) dan 92 IDI Cabang (Kota/Kabupaten). Angka tertinggi, dari Jawa Timur sebanyak 41 dokter, dua dokter gigi, dan 43 perawat. Sementara dari DIY dilaporkan terdapat enam dokter dan dua perawat yang meninggal.

Menurut Adib Khumaidi, kenaikan jumlah kematian tenaga

medis dan tenaga kesehatan ini merupakan salah satu dampak dari peningkatan jumlah penderita Covid-19 baik yang dirawat maupun yang termasuk orang tanpa gejala (OTG). Pilkada yang baru saja selesai juga menjadi potensi fluktuasi naiknya angka penularan Covid-19.

"Kami mengimbau masyarakat dan kepala daerah serta pendukungnya untuk menghindari proses aktivitas yang melibatkan berkerumunnya massa. Dan bagi setiap orang untuk memeriksakan kesehatannya apabila terdapat gejala, dan melakukan testing meskipun juga tanpa gejala," kata Adib.

Sedangkan Ketua Umum Perhimpunan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) Dr Drg Sri Hananto Seno SpBM(K) MM mengimbau masyarakat agar memperhatikan kebersihan gigi dan mulut untuk menghindari penularan Covid-19. (San)-d

### BANTU PEMBELAJARAN DARING

## Rumah Belajar Belum Dimanfaatkan Maksimal

YOGYA (KR) - Dalam pembelajaran daring, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sebenarnya memiliki Rumah Belajar yang bisa dijadikan referensi sumber belajar bagi siswa dan guru. Namun sayangnya, portal pembelajaran ini belum dimanfaatkan maksimal oleh siswa maupun guru, padahal gratis.

"Belum banyak yang memanfaatkan. Secara nasional baru sekitar 10-15 persen guru dan siswa yang memanfaatkannya. Makanya kami terus-menerus melakukan sosialisasi, antara lain melalui kegiatan pemilihan Duta Rumah Belajar," ungkap Dwi Kustari SSos, Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran (PTP) Ahli Muda di Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Jawa Tengah kepada KR di Yogyakarta, Selasa (15/12).

Dipaparkan, portal pembelajaran ini berbasis web yang menyediakan bahan belajar serta fasilitas komunikasi yang mendukung interaksi antarkomunitas. Rumah Belajar hadir sebagai bentuk inovasi pembelajaran di Era Industri 4.0 yang dapat dimanfaatkan oleh siswa

dan guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), SD, SMP, SMA/SMK sederajat. Menurutnya, dengan menggunakan Rumah Belajar, kita dapat belajar di mana saja, kapan saja dengan siapa saja. Seluruh konten yang ada di Rumah Belajar dapat diakses dan dimanfaatkan secara gratis.

Dwi Kustari mengatakan, dalam pembelajaran online, Kemendikbud berusaha memanfaatkan semua media informasi dan komunikasi yang tersedia dan mudah diakses, baik guru, siswa maupun wali siswa. Meski di beberapa wilayah karena kondisi geografis di Indonesia yang sangat beragam, tidak semua daerah bisa melaksanakan pembelajaran online/daring, sehingga ada juga sekolah yang memadukan pembelajaran daring dan luring.

Diakui, selama pembelajaran daring yang sudah berlangsung hampir 10 bulan, tidak hanya anak yang merasa jenuh, namun juga orangtua siswa dan guru. "Jangan dikira selama pandemi guru-guru itu pekerjaannya lebih santai. Kenyataan di lapangan, justru bebannya lebih berat karena guru harus

menyiapkan materi dan media yang mudah diakses oleh semua siswa dengan berbagai latar belakang kondisi sosial ekonomi," paparnya.

Demikian pula orangtua, merasa reah karena harus berperan sebagai guru saat mendampingi anaknya, sementara banyak ortu yang tidak mempunyai bekal memadai untuk peran tersebut.

Menurutnya, agar siswa tak jenuh dengan pembelajaran daring juga sangat tergantung pada kreativitas guru. Bagaimana guru bisa menyampaikan informasi/materi dengan jelas dan mudah diterima oleh siswa, media pembelajaran apa yang digunakan dan bisa menarik minat siswa biar siswa tidak bosan.

"Seperti saat daring Zoom, biar anak-anak semangat, tidak bosan, selain menyampaikan materi, guru juga bisa memberikan kuis yang dikemas menarik, misal menggunakan aplikasi Quizizz. Tidak ada hadiahnya sih, tapi biasanya anak-anak senang ketika namanya disebut sebagai Juara 1," ucapnya. (Ret)-d

### POTENSIAL JADI TEMPAT PAPARAN VIRUS

## Satgas Ingatkan Pengawasan Prokes Perkantoran

YOGYA (KR) - Satgas Penanganan Covid-19 Kota Yogyakarta kembali mengingatkan pengawasan protokol kesehatan (prokes) di lingkungan perkantoran. Hal ini menyusul temuan sejumlah paparan di lingkungan perkantoran termasuk area Balaikota Yogyakarta.

Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti menyatakan, beberapa kasus penularan di perkantoran lingkungan Balaikota Yogyakarta menjadi perhatian agar kasusnya tidak semakin meluas. "Tidak boleh menganggap remeh. Bisa dikatakan semua lingkungan di semua tempat memiliki potensi penularan. Tidak ada yang aman," tandasnya, Selasa (15/12).

Pengawasan protokol di perkantoran, kata Haryadi, tidak hanya dilakukan Satgas di tiap unit kerja, tetapi semua pegawai diharapkan memiliki peran yang sama untuk saling mengingatkan

agar disiplin menerapkan prokes. Protokol itu pun tidak sekadar menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak, tetapi juga diimbangi menghindari kerumunan. Karena itu, sebagai upaya meningkatkan pengawasan prokes, pihaknya akan menambal paparan prokes di kompleks Balaikota.

Imbauan itu tidak hanya bagi pegawai melainkan juga pengunjung yang memiliki kepentingan untuk mengakses layanan. "Imbauan itu harus diimbangi peningkatan pengawasan. Tujuannya bukan untuk menyalahkan, tapi saling mengingatkan. Misalnya ada yang memakai masker tidak benar, ya diingatkan untuk membetulkan. Toh ini untuk kepentingan kita semua," katanya.

Apalagi, tingkat penularan kasus Covid-19 di Kota Yogyakarta saat ini menca-

pai 2,5. Artinya, dari satu orang yang tertular memiliki potensi untuk menularkan kepada dua hingga tiga orang lainnya. Satu-satunya cara untuk mencegah agar penularan kasus tidak semakin meluas, dengan menerapkan prokes. Karenanya kepedulian dan kewaspadaan menjadi kunci dalam upaya pencegahan penularan kasus Covid-19 yang semakin luas.

Ketua Harian Satgas Penanganan Covid-19 Kota Yogyakarta Heroe Poerwadi mengatakan, petugas masih menelusuri terhadap temuan kasus terkonfirmasi positif di lingkungan Balaikota. Tercatat ada dua Kepala Dinas dan sejumlah pegawai lainnya yang terparap dari lingkungan perkantoran. "Kami menggunakan acuan dari Kementerian Kesehatan bahwa uji swab dilakukan 14 hari setelah kontak erat supaya hasilnya lebih valid," jelasnya. (Dhi)-d